RAUDHAH Proud To Be Professionals *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*
Volume 10 Nomor 2 Edisi Agusutus 2025
P-ISSN : 2541-3686 E-ISSN : 2746-2447

DIFUSI NILAI NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM KURIKULUM PAI: ANALISIS KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI

[1]Rofi Chatus Sholekah, [2]Muhammad Arif Baiquni, [3]Tsaaniyatush Shoolihah Fauzan

[1]Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan, Universitas Alma Ata Yogyakarta.
Email: 241500044@almaata.ac.id
[2]Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan, Universitas Alma Ata Yogyakarta. Email: 241500039@almaata.ac.id
[3]Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan, Universitas Alma Ata Yogyakarta. Email: 241500047@almaata.ac.id

Abstract *This research is motivated by the importance of responding to the increasing symptoms of intolerance and radicalism through more moderate, contextual, and transformative religious education. This study is relevant because it explores the relationship between normative curriculum documents and learning practices that occur in the classroom. This study uses a library research approach, by reviewing policy documents of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, Islamic Religious Education textbooks, and the results of academic research in the last five years (2020–2024). The analysis was carried out thematically and critically with a descriptive qualitative approach. The results of the study show that the values of tawasuth (moderation), tasamuh (tolerance), and i'tidal (justice) have been explicitly integrated into the curriculum and teaching materials. However, at the implementation level, gaps are still found due to limited teacher understanding, lack of pedagogical training, minimal contextual teaching guides, and the influence of the social environment that does not fully support moderate values.*

Keywords: *Religious Moderation Islamic Religious Education, Curriculum, Education Policy, Implementation.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya, bahasa, dan agama yang tinggi. Di tengah pluralitas tersebut, tantangan utama bangsa adalah menjaga kohesi sosial dan mencegah konflik berbasis identitas, khususnya keagamaan. Pendidikan berperan strategis dalam membentuk sikap keberagamaan yang inklusif dan toleran sejak dini. Dalam konteks ini, Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki posisi penting sebagai instrumen pembentukan karakter moderat. Moderasi beragama, yang mengedepankan nilai keseimbangan, keadilan, dan toleransi, menjadi pendekatan yang relevan untuk menjawab tantangan radikalisme dan intoleransi yang kian menguat. Pemerintah pun telah merespons hal ini melalui pengarusutamaan moderasi beragama dalam kebijakan nasional, termasuk integrasi nilai-nilainya ke dalam kurikulum PAI.

Kendati secara normatif kurikulum PAI telah memuat nilai-nilai moderasi seperti tawasuth, tasamuh, tawazun, dan i'tidal, pelaksanaan di lapangan belum berjalan optimal. Beberapa studi (Siregar, 2021; Nawawi & Susanto, 2022) mengungkapkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan implementasi, baik dari segi pemahaman guru, metode pengajaran, hingga resistensi sosial dari lingkungan yang cenderung eksklusif (Siregar,2021) Kurikulum seringkali hanya menjadi simbol tanpa terinternalisasi dalam praktik pembelajaran. Di sisi lain, belum banyak kajian yang secara spesifik dan sistematis menganalisis bagaimana proses difusi nilai-nilai moderasi beragama berlangsung melalui kebijakan pendidikan dan implementasi kurikulum PAI di tingkat sekolah. Inilah celah riset (research gap) yang ingin dijawab oleh artikel ini, sekaligus menjadi titik tolak kontribusi ilmiahnya Nawawi & Susanto ,2022).

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kebijakan pengarusutamaan nilai moderasi beragama dalam kurikulum PAI serta menelaah bagaimana implementasinya di tingkat satuan pendidikan. Novelty dari kajian ini terletak pada fokusnya yang tidak hanya menyoroti isi kurikulum, tetapi juga mengevaluasi efektivitas proses difusi nilai-nilai tersebut dari level kebijakan hingga praktik pembelajaran. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam perumusan strategi pendidikan yang lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk

Sebagian besar penelitian sebelumnya mengenai moderasi beragama dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) cenderung berfokus pada analisis terhadap isi kurikulum, khususnya sejauh mana nilai-nilai moderasi beragama dimuat secara eksplisit maupun implisit dalam dokumen kurikulum formal. Fokus tersebut meskipun penting, belum sepenuhnya menjawab tantangan implementatif di lapangan. Artikel ini menawarkan perspektif baru dengan menggeser perhatian dari sekadar analisis konten menuju proses difusi nilai-nilai moderasi, yakni bagaimana nilai-nilai tersebut dialirkan secara sistemik dari tataran kebijakan nasional hingga ke dalam praktik pembelajaran di tingkat satuan pendidikan. Proses ini mencakup tahapan artikulasi nilai dalam kebijakan, transmisi ke aktor-aktor pendidikan, pemaknaan oleh guru, hingga realisasi dalam strategi pedagogis. Dengan demikian, pendekatan penelitian ini tidak hanya menjawab pertanyaan apa yang diajarkan, melainkan juga bagaimana nilai-nilai tersebut ditransformasikan dalam konteks praksis pendidikan yang konkret.

Lebih jauh, penelitian ini mengusulkan pendekatan analitis yang memperhatikan interkoneksi antara aktor kebijakan, pendidik, dan lingkungan sosial sebagai elemen kunci dalam keberhasilan integrasi nilai-nilai moderasi beragama. Tidak hanya melihat kurikulum sebagai teks normatif yang bersifat sentralistik, artikel ini juga mengkaji dinamika antara pembuat kebijakan (seperti Kementerian Agama dan dinas pendidikan), pelaksana kebijakan (guru dan kepala sekolah), serta

pengaruh konteks sosial budaya di lingkungan peserta didik. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa proses difusi nilai moderasi bukanlah jalur linear yang bebas hambatan, tetapi bersifat multidimensional, dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, kekuatan institusional, serta resistensi nilai-nilai lokal yang bersifat konservatif. Pendekatan seperti ini menjadikan artikel ini memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan studi-studi terdahulu yang cenderung bersifat normatif, tekstual, dan kurang mempertimbangkan dinamika praksis.

Adapun dari sisi kesenjangan kajian (research gap), wacana mengenai moderasi beragama dalam pendidikan Islam memang telah cukup berkembang, namun sebagian besar penelitian masih terjebak pada wilayah normatif dan konseptual. Kajian yang secara sistematik mengkaji mekanisme diseminasi atau difusi nilai moderasi dari level kebijakan ke tingkat pelaksanaan masih sangat terbatas. Padahal, efektivitas pendidikan moderasi sangat bergantung pada keterpaduan antara desain kebijakan, pemahaman aktor pelaksana, serta dukungan lingkungan sosial yang kondusif. Artikel ini mengisi kekosongan tersebut dengan menekankan bahwa difusi nilai-nilai moderasi beragama perlu dilihat sebagai proses dinamis, adaptif, dan kontekstual, bukan semata-mata sebagai produk kebijakan atau kurikulum yang bersifat statis.Sejalan dengan itu, penelitian ini tidak hanya bersifat evaluatif terhadap kebijakan, tetapi juga reflektif terhadap realitas pendidikan di lapangan, khususnya dalam mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam proses internalisasi nilai-nilai moderasi melalui PAI. Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam merumuskan strategi pendidikan yang lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Berbeda dari pendekatan yang bersifat idealistik dan normatif semata

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research), yakni metode kualitatif yang berfokus pada penelusuran, seleksi, dan analisis data sekunder dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan isu difusi nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada karakter kajian yang bersifat konseptual-analitis dan bertujuan untuk mengevaluasi formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan secara kritis, tanpa keterlibatan data empiris lapangan secara langsung. Sumber data utama dalam penelitian ini mencakup dokumen kebijakan pemerintah (seperti Peraturan Menteri Agama, dokumen strategis Kementerian Agama tentang moderasi beragama), dokumen kurikulum PAI terkini (Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013), buku ajar resmi PAI, serta artikel-artikel ilmiah nasional dan internasional yang terbit dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2018–2023). Di samping itu, digunakan

pula literatur sekunder berupa laporan riset lembaga pemerintah, buku-buku akademik, serta publikasi dari organisasi masyarakat sipil yang relevan dengan topik penelitian.Dalam proses seleksi literatur, penulis menerapkan kriteria inklusi berupa: (1) sumber yang secara langsung membahas moderasi beragama dalam konteks pendidikan atau kebijakan kurikulum; (2) dipublikasikan dalam rentang waktu lima tahun terakhir; dan (3) berasal dari penerbit, lembaga, atau jurnal yang memiliki kredibilitas akademik. Adapun kriteria eksklusi meliputi: (1) sumber yang bersifat opini non-akademik tanpa landasan teoritis yang kuat; serta (2) artikel yang tidak tersedia dalam versi lengkap. Total terdapat 32 dokumen yang dijadikan data utama dalam analisis, terdiri dari regulasi, dokumen kurikulum, buku ajar, dan artikel jurnal. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan tematik. Proses ini mencakup tahapan membaca, mengidentifikasi isu sentral, melakukan coding manual, serta mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama yang relevan, seperti: (1) formulasi kebijakan moderasi beragama dalam kurikulum PAI, (2) strategi implementasi kebijakan di satuan pendidikan, (3) peran aktor pendidikan dalam difusi nilai moderasi, dan (4) faktor sosial budaya yang memengaruhi praktik di lapangan. Untuk menjaga rigor akademik, penulis memvalidasi data melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan dan mengonfirmasi temuan antarjenis sumber (dokumen pemerintah, artikel ilmiah, dan literatur pendukung lainnya).

Hasil dan Pembahasan

Pada kajian ini, temuan utama dipetakan ke dalam tiga fokus yang saling berkaitan: (1) Integrasi kebijakan moderasi beragama dalam kurikulum PAI, (2) Kandungan materi dan pendekatan pedagogis, serta (3) Kesenjangan implementasi di tingkat guru. Ketiganya memberikan gambaran utuh tentang bagaimana nilai-nilai moderasi beragama dikembangkan secara konseptual dalam dokumen kebijakan dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Berdasarkan telaah terhadap dokumen kebijakan nasional seperti Kurikulum 2013 PAI, Renstra Kementerian Agama 2020–2024, serta Regulasi tentang penguatan moderasi beragama, ditemukan bahwa nilai-nilai seperti tawasuth (jalan tengah), tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan), dan i'tidal (keadilan) telah diarusutamakan secara eksplisit dalam struktur kurikulum, kompetensi dasar, dan indikator pembelajaran. (Afida et al, 2024).Kementerian Agama melalui dokumen resmi tahun 2019 menyusun Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI/KD) yang tidak hanya menargetkan aspek kognitif, tetapi juga pembentukan sikap sosial dan spiritual yang inklusif dan moderat. Sebagai contoh, KI-1 dan KI-2 dalam Kurikulum PAI menekankan pengamalan ajaran agama dan pembentukan perilaku seperti toleransi dan kepedulian sosial. Nilai-nilai ini kemudian diimplikasikan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) oleh guru di tingkat satuan pendidikan. Tabel 1

berikut menyajikan beberapa contoh pemetaan KD PAI yang telah mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama:

Tabel 1.1
Pemetaan Kompetensi Dasar PAI dan Nilai-Nilai Moderasi Beragama

Jenjang	Mata Pelajaran	Kompetensi Dasar (KD)	Nilai Moderasi Beragama
SMP Kelas VIII	Akidah Akhlak	Meneladani sifat terpuji para rasul	Tawasuth (bersikap seimbang), Akhlak mulia
SMA Kelas X	Fikih	Menerapkan hukum zakat dan hikmahnya dalam kehidupan sosial	Solidaritas, Keadilan Sosial (i'tidal)
SMP Kelas IX	Sejarah Kebudayaan Islam	Memahami peran ulama dalam menyebarkan Islam di Nusantara	Toleransi (tasamuh), Penghargaan budaya
SMA Kelas XI	Akhlak	Menunjukkan sikap saling menghormati antarumat beragama dalam pergaulan sehari-hari	Anti-ekstremisme, Penghormatan pluralisme

Sumber: *Dokumen Kurikulum 2013 PAI, Kementrian Agama Republik Indonesia (2019), diolah*

Kementerian Agama juga menetapkan Moderasi Beragama sebagai salah satu dari tujuh program prioritas nasional, sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra 2020–2024. Kebijakan ini dijabarkan secara teknis dalam bentuk pelatihan guru, penyusunan modul tematik moderasi, serta bahan ajar berbasis prinsip inklusivitas. Nilai-nilai tersebut dirancang untuk mendorong peserta didik menjadi subjek aktif dalam membangun perdamaian dan mencegah ekstremisme di lingkungan sosial mereka. Sebagai alat evaluasi, Indeks Kinerja Moderasi Beragama (IKMB) dikembangkan oleh Kementerian Agama sebagai instrumen kuantitatif untuk mengukur ketercapaian pengarusutamaan moderasi di lembaga pendidikan. Survei IKMB 2022 yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kemenag dengan melibatkan lebih dari 4.000 responden dari 34 provinsi menunjukkan bahwa sekitar 62% satuan pendidikan Islam telah menerapkan nilai-nilai moderasi secara konsisten, baik dalam kegiatan

intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Namun, laporan tersebut tidak merinci secara teknis metodologi sampling, instrumen pengukuran, atau konteks sosial responden, yang membuat interpretasi terhadap validitas data tersebut perlu kehati-hatian (Hasibuan et al, 2024).

Kandungan Materi dan Pendekatan Pedagogis

Kajian terhadap buku ajar PAI edisi terbaru (Kemenag, 2021) mengindikasikan bahwa nilai-nilai moderasi telah terintegrasi secara menyeluruh dalam isi materi. Topik-topik dalam akidah, akhlak, fikih, dan sejarah tidak lagi bersifat dogmatis, melainkan menekankan nilai-nilai humanis, keadilan, dan keberagaman. Misalnya, dalam pembahasan akhlak, siswa dikenalkan dengan konsep toleransi, empati, dan antikekerasan, yang disajikan dalam konteks sosial nyata. Buku ajar juga merekomendasikan transformasi metode pengajaran dari pola verbalistik menuju pendekatan partisipatif dan reflektif. Guru didorong untuk menggunakan strategi seperti problem-based learning, studi kasus konflik keagamaan, atau penulisan jurnal keagamaan pribadi yang merefleksikan pengalaman siswa dalam hidup berdampingan. Guna memperkuat penjabaran ini, berikut disajikan Tabel 2 sebagai contoh keterkaitan antara materi pembelajaran, pendekatan pedagogis, dan nilai moderasi beragama yang diinternalisasi:

Tabel 2.1

Contoh Integrasi Materi, Pendekatan Pedagogis, dan Nilai Moderasi Beragama

Tema Pembelajaran	Materi Pokok	Metode Pembelajaran	Nilai Moderasi yang Ditekankan
Akhlak Remaja Islami	Menghindari fanatisme buta	Diskusi kelompok, studi kasus	Toleransi, anti-ekstremisme
Sejarah Islam	Dakwah Walisongo di Nusantara	Presentasi budaya, eksplorasi kearifan lokal	Kearifan lokal, adaptasi budaya
Fikih Sosial	Zakat dan keadilan sosial	Simulasi pembagian zakat, debat kelas	Keadilan, empati sosial
Aqidah	Tauhid dan implikasinya dalam hidup	Refleksi pribadi, penulisan jurnal	Kesadaran sosial, tanggung jawab

Sumber: Buku Ajar PAI Kemenag 2021, dimodifikasi penulis

Kesenjangan Implementasi dan Kesiapan Guru

Kajian pustaka dan dokumen evaluatif menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai moderasi di tingkat pelaksana, terutama guru PAI, masih mengalami sejumlah hambatan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa banyak guru belum memperoleh pelatihan khusus dalam menginternalisasi konsep moderasi beragama ke dalam metode pembelajaran mereka. Mustofa & Nuryana (2020) Kegiatan pelatihan yang dilakukan pemerintah pun belum merata secara geografis dan substantif.Guru yang tidak memiliki pemahaman konseptual yang utuh cenderung menyederhanakan moderasi menjadi ajakan normatif semata, tanpa mampu mengaitkannya dengan realitas pluralisme yang kompleks di sekolah. Ditambah lagi, dukungan institusional seperti modul ajar tematik, sistem monitoring yang representatif, serta peran kepala sekolah dalam pengawasan belum optimal. Sebagian guru bahkan menghadapi tekanan sosial dari lingkungan sekitar yang cenderung konservatif, menyebabkan mereka enggan mengeksplorasi pendekatan yang inklusif. Masalah lain yang mengemuka adalah penilaian kebijakan yang masih bersifat administratif. Evaluasi keberhasilan pelaksanaan moderasi seringkali terbatas pada keberadaan istilah "moderasi" dalam RPP, bukan pada efektivitasnya dalam membentuk sikap siswa secara nyata.

Pembahasan

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dinamika difusi nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI), baik dari sisi kebijakan nasional maupun implementasi di tingkat satuan pendidikan. Berdasarkan hasil studi pustaka, diperoleh tiga temuan utama: (1) integrasi nilai-nilai moderasi dalam dokumen kebijakan dan kurikulum; (2) pergeseran pendekatan pedagogis ke arah yang lebih reflektif dan inklusif; serta (3) kesenjangan signifikan dalam implementasi di tingkat praktis. Ketiga temuan ini menunjukkan bahwa difusi nilai moderasi merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor—baik struktural, kultural, maupun pedagogis. *Pertama,* integrasi nilai-nilai moderasi dalam kurikulum PAI mencerminkan arah kebijakan negara yang bertujuan membentuk ekosistem pendidikan agama yang toleran, adil, dan inklusif. Dokumen-dokumen seperti Rencana Strategis Kementerian Agama 2020–2024 dan penguatan Kompetensi Dasar dalam Kurikulum 2013 hasil revisi menjadi indikator formal dari upaya ini. Kurikulum tidak lagi semata menjadi medium transmisi dogma, melainkan alat strategis untuk membentuk warga negara yang berwawasan multikultural dan menjunjung nilai-nilai kebinekaan. Dalam konteks ini, kurikulum PAI berfungsi sebagai perangkat ideologis negara yang mengarusutamakan Islam rahmatan lil 'alamin melalui narasi-narasi pedagogis yang konstruktif. Konsep ini sejalan

dengan kerangka pendidikan transformatif (transformative education), yang menempatkan pendidikan sebagai proses kritis untuk membebaskan peserta didik dari wacana eksklusif dan intoleran. Nilai-nilai seperti tawasuth (moderat), tasamuh (toleransi), dan i'tidal (keadilan) telah diintegrasikan secara eksplisit maupun implisit ke dalam materi pelajaran seperti akidah, fikih, akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam. Misalnya, representasi Walisongo dalam buku ajar PAI tidak lagi bersifat kronologis-sejarah semata, melainkan ditampilkan sebagai model dakwah kultural yang relevan untuk konteks kebhinekaan Indonesia (Kemenag, 2023).

Kedua, temuan penting lainnya adalah adanya pergeseran pendekatan pedagogis dari yang bersifat instruksional ke arah yang lebih partisipatif dan kontekstual. Guru diharapkan tidak lagi hanya berperan sebagai transmitter informasi, tetapi juga sebagai transformer, yakni agen perubahan yang mampu mengartikulasikan nilai-nilai moderasi dalam pembelajaran yang kritis dan dialogis. Strategi seperti diskusi kelompok, simulasi sosial, refleksi individu, dan pembelajaran berbasis proyek direkomendasikan untuk mendekatkan materi ajar dengan realitas sosial peserta didik. Pendekatan ini sejalan dengan teori sociocultural Vygotsky, terutama dalam konteks scaffolding yang menuntut guru untuk membangun jembatan makna antara teks kurikulum dengan konteks kehidupan siswa (Vygotsky, 1978). Namun demikian, penerapan pendekatan transformatif ini masih menghadapi tantangan besar di lapangan. Data sekunder yang dikaji menunjukkan bahwa sebagian besar guru PAI belum memiliki kapasitas pedagogis yang memadai dalam mengintegrasikan nilai-nilai moderasi ke dalam praktik pembelajaran Nawawi & Susanto (2022),

Minimnya pelatihan, tidak adanya panduan ajar yang kontekstual, serta resistensi sosial dari lingkungan sekitar sekolah menjadi faktor penghambat utama. Di beberapa wilayah, kuatnya arus konservatisme menyebabkan guru berada dalam posisi dilematis antara melaksanakan mandat kebijakan nasional dan menjaga stabilitas sosial lokal (Heri, 2024).Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan, meskipun dirancang dengan konstruksi wacana yang ideal, dapat mengalami distorsi dalam proses implementasi akibat tekanan sosial dan keterbatasan kapasitas pelaksana kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Ball (1994), kebijakan pendidikan tidak pernah netral; ia selalu ditafsirkan ulang oleh para aktor dalam konteks sosial masing-masing. Oleh karena itu, difusi nilai moderasi tidak bisa dipahami secara linear sebagai alih informasi dari pusat ke daerah, tetapi sebagai proses negosiasi multi-level yang penuh dinamika dan seringkali berhadapan dengan tantangan ideologis dan struktural.

Ketiga, kesenjangan antara kebijakan dan praktik mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan sistemik dalam pengarusutamaan moderasi beragama. Revisi kurikulum tidak akan cukup tanpa disertai oleh penguatan kapasitas guru, reformasi pedagogi, serta dukungan kelembagaan

yang berkelanjutan. Perlu dilakukan pelatihan intensif dan berkelanjutan yang tidak hanya membahas aspek normatif dari moderasi, tetapi juga memberikan strategi aplikatif untuk pengajaran di ruang kelas yang multikultural. Selain itu, dibutuhkan modul ajar kontekstual yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan berbasis praktik baik dari sekolah-sekolah yang telah berhasil membudayakan nilai moderasi (Sholeh et al, 2024). Lebih lanjut, pelibatan komunitas sipil, organisasi keagamaan, dan orang tua siswa sangat krusial dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung. Moderasi beragama harus dijadikan gerakan kolektif, bukan hanya program sektoral di bawah Kementerian Agama. Dalam hal ini, penguatan school culture yang menekankan dialog, inklusivitas, dan toleransi menjadi agenda penting yang tidak boleh diabaikan. Pendidikan nilai tidak bisa hanya diajarkan; ia harus dihidupkan dalam keseharian institusi pendidikan.

Terakhir, pendekatan evaluasi terhadap kebijakan pendidikan moderasi perlu bergeser dari sekadar audit administratif ke arah impact-based assessment. Evaluasi keberhasilan tidak cukup diukur melalui keberadaan indikator formal seperti RPP dan buku ajar, tetapi harus dilihat dari transformasi sikap, persepsi, dan praktik sosial siswa dalam kehidupan sehari-hari. Pengukuran berbasis proses, partisipasi siswa, dan indikator perubahan perilaku merupakan instrumen evaluatif yang lebih relevan dalam konteks pendidikan nilai. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memberikan evaluasi terhadap struktur kebijakan, tetapi juga menyumbang refleksi kritis terhadap praktik pendidikan Islam kontemporer di Indonesia. Penelitian ini mendukung sekaligus memperluas temuan-temuan sebelumnya yang bersifat normatif, dengan menawarkan perspektif interkoneksi antara aktor, konteks, dan kebijakan sebagai penentu utama keberhasilan implementasi nilai moderasi beragama dalam Pendidikan (Hasibuan et al, 2024).

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa upaya difusi nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) telah mengalami perkembangan signifikan dalam aspek kebijakan, namun masih menghadapi tantangan besar dalam tataran implementasi. Secara kebijakan, Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan memasukkan nilai-nilai *tawasuth* (moderat), *tasamuh* (toleran), dan *i'tidal* (adil) secara sistematis ke dalam dokumen kurikulum, buku ajar, serta rencana strategis nasional. Hal ini mencerminkan kesadaran negara terhadap pentingnya membangun narasi keislaman yang inklusif, kontekstual, dan adaptif terhadap keberagaman sosial budaya di Indonesia. Kurikulum terbaru juga menunjukkan

pergeseran paradigma yang signifikan, dari pendekatan tekstual-doktrinal menuju pendekatan transformatif dan partisipatif. Materi ajar PAI kini dirancang tidak hanya untuk mentransmisikan ilmu agama secara kognitif, tetapi juga membentuk karakter peserta didik yang moderat melalui pendekatan pedagogis berbasis refleksi, studi kasus, dan diskusi lintas perspektif. Pendekatan ini diharapkan mampu menjawab tantangan zaman, seperti munculnya ekstremisme, intoleransi, dan penyalahgunaan agama di ruang publik digital.

Namun demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam pelaksanaan di sekolah-sekolah. Kesenjangan implementasi masih sangat terasa, terutama karena terbatasnya pemahaman dan kompetensi guru PAI dalam menginternalisasi nilai-nilai moderasi. Sebagian besar guru belum mendapatkan pelatihan khusus, belum memiliki akses pada perangkat ajar yang kontekstual, serta menghadapi tekanan sosial budaya di lingkungan sekitar yang cenderung konservatif. Kurangnya sistem pendampingan dan evaluasi yang menilai hasil pembelajaran berbasis nilai turut memperparah ketimpangan antara visi kurikulum dan realitas kelas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan agama yang menekankan moderasi beragama membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif. Tidak cukup hanya mengandalkan revisi kurikulum dan buku ajar, tetapi juga diperlukan investasi serius dalam pengembangan kapasitas guru, penyusunan modul ajar kontekstual, penguatan budaya sekolah inklusif, serta evaluasi berbasis perubahan sikap dan perilaku peserta didik. Untuk mewujudkan pendidikan Islam yang benar-benar moderat dan transformatif, semua pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah, sekolah, guru, hingga masyarakat—harus terlibat dalam membangun ekosistem pendidikan yang mendukung nilai-nilai keberagaman, toleransi, dan keadilan sosial.

Daftar Pustaka

Afida, I., Fauziah, R., & Nuraini, A. (2024). Strategi Guru dalam Menginternalisasi Nilai Moderasi Beragama melalui Literasi Digital. Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme, 8(1), 45–58.

Amin, M., & Raikhan, M. (2023). Penguatan Kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis Moderasi Beragama. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Hasibuan, D., Widodo, A., & Sahlan, A. (2024). Budaya Sekolah Inklusif dalam Penguatan Moderasi Beragama: Studi Kasus di Kota Pontianak. Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, 15(2), 122–138.

Heri, A. (2024). Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Moderasi

Beragama di Sekolah Negeri. Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 9(1), 20–35.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Moderasi beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.

Mustofa, M., & Nuryana, Z. (2020). Reaktualisasi kurikulum pendidikan agama Islam di era moderasi beragama. Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, 5(2), 234–247.

Rohman, F., Nawawi, M. R., & Susanto, D. (2022). Analisis Pemahaman Guru PAI terhadap Konsep Moderasi Beragama. Islamic Educational Review, 4(2), 99–110.

Sholeh, M., Fathoni, A., & Mulyadi, D. (2024). Implementasi Kurikulum PAI Moderat di SMA Muhammadiyah: Pendekatan Diferensiasi dan Kontekstual. Jurnal Pendidikan Islam Indonesia, 6(1), 66–80.

Siregar, S. (2021). Kurikulum pendidikan agama Islam berbasis moderasi beragama dalam konteks multikultural. Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, 12(1), 65–76.

Zuhdi, M. (2023). Pendidikan Islam dan tantangan radikalisme: Strategi moderasi dalam kurikulum sekolah. Jurnal Pendidikan Islam, 8(1), 15–27.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s)

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

